

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM  
PENGEMBANGAN JASA KEUANGAN GUNA  
MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS  
Koordinasi Antar Manager Dengan Pengurus Dalam  
Mensejahterakan Anggota**

**OLEH:  
STEFANUS NGEBI, S.H.  
NPM. A2021151021**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang dalam pengembangan jasa keuangan guna menghadapi persaingan bisnis dalam upaya mensejahterakan anggotanya. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan belum mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya secara maksimal, kendala-kendala dan solusi yang timbul dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan, serta pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa penyebab pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan belum mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya secara maksimal dikarenakan menurunnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.654.836.928,- (28,08%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 5.892.671.535,-. Sedangkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 640.155.767,- (24,09%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 2.656.957.820,-. Tolak ukur kesejahteraan anggota koperasi kredit tergantung dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui target yang ditentukan, apabila mencapai target maka semakin besar pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggotanya dan otomatis dapat mensejahterakan anggota dari Koperasi Kredit BIMA Sintang. Kendala-kendala yang timbul dan solusi dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan adalah: (a) Kinerja Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang masih asal-asalan; (b) Pengurus Koperasi Kredit Bina

Masyarakat (BIMA) Sintang memang belum mampu melakukan pemasaran dan persiapan persediaan produk-produk dalam cara pengelolaan lembaga yang ada; (c) Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi masih belum dapat dilakukan secara tepat waktu; (d) Kinerja antar Manajer yang masih mengedepankan sikap ego sektoral; (e) Minimnya penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit; (f) Anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota; dan (g) Kurangnya partisipasi para anggota dalam kegiatan organisasi koperasi. Berkaitan dengan solusi solusi dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan, antara lain: (a) Melakukan mekanisme pemilihan pengurus yang profesional; (b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (c) Meningkatkan koordinasi antara pengurus dan manajer; (d) Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit; dan (e) Meningkatkan partisipasi para anggota dalam kegiatan organisasi koperasi kredit. Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis, maka Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagian besar anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang tidak hadir. Hal ini disebabkan karena domisili dari anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang jauh, kurang pedulinya para anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang dalam mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Pengurus hanya mengundang para perwakilan anggota saja. Dengan demikian, pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya di hadapan beberapa perwakilan anggota saja.

## **ABSTRACT**

This thesis discusses the accountability of the Sintang Community Branch Manager (BIMA) Sintang in the development of financial services in order to face business competition in the effort of prospering its members. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the causes of Sintang Community Credit Co-operative (BIMA) as a manager of financial services has not brought prosperity to its members maximally, constraints and solutions that arise in managing Credit Cooperatives Community Development (Bina Kredit Bina Masyarakat) BIMA) Sintang as a financial service, as well as the responsibility of the Sintang Community Branch Manager (BIMA) as a financial services manager in developing its business to face business competition. Through literature study using normative juridical research method, it is concluded that the cause of management of Sintang Community Bina Cooperative (BIMA) as a financial service has not brought welfare to its members maximally due to the declining share of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members. Shares Remaining of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members in 2015 and 2016 experienced a significant decrease or did not reach the target that has been determined. Shares Remaining of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members in 2015 is only Rp. 1.654.836.928,- (28.08%) of the targeted Rp. 5.892.671.535,-. While the division of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members in 2016 is only Rp. 640.155.767,- (24.09%) of the targeted Rp. 2.656.957.820,-. The measure of the welfare of the members of the credit cooperative depends on the distribution of Time Outcome of the Business (SHU) through the specified target, when it reaches the target, the greater the share of Business Result (SHU) obtained by its members and automatically able to welfare the members of the BIMA Sintang Credit Cooperative. The obstacles that arise and the solution in managing the Sintang Community Credit Cooperative (BIMA) Sintang as the manager of financial services are: (a) The performance of the Sintang Community Balance Cooperative (BIMA) which is still at random; (b) Sintang Community Branch Manager (BIMA) has not been able to do the marketing and preparation of inventory of products in the way the management of existing institutions; (c) The holding of the Annual Meeting of Members (RAT) of the cooperative is still not timely; (d) Performance among Managers who still prioritize sectoral ego attitudes; (e) lack of training and technical guidance (bimtek) for the Board or members of credit cooperatives; (f) Members are not aware of their rights and obligations as members; And (g) Lack of participation of members in the activities of cooperative organizations. Related to solution solution in managing Sintang Community Balance Cooperative (BIMA) as manager of financial services, among others: (a) To conduct professional management election mechanism; (b) Improving the quality of Human Resources (HR); (c) Improve coordination between management and managers; (d) Improving training and technical guidance (bimtek) for the Board and members of credit cooperatives; And (e) Increasing the participation of members in the

activities of credit cooperative organizations. Accountability of Sintang Community Branch Manager (BIMA) Sintang as a financial services manager in developing its business in order to face business competition, the Sintang Community Credit Cooperative Board (BIMA) Sintang has conducted Annual Members Meeting (RAT). However, in the implementation of the Annual Members Meeting (RAT) in 2015 and 2016 most members of Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang did not attend. This is due to the domicile of the distant Sintang Community Branch (BIMA) members, the lack of care of the members of the Sintang Community Branch Cooperative (BIMA) in following the Annual Members Meeting (RAT) and the Board only invites representatives of the members only. Thus, the responsibility of the Sintang Community Branch Manager (BIMA) as the manager of financial services in the Annual Members Meeting (RAT) only in the presence of several representative members only.

## **A. PENDAHULUAN**

Koperasi Kredit merupakan salah satu elemen pendukung bagi perkembangan perekonomian masyarakat di Indonesia. Dalam perkembangannya, Koperasi Kredit mulai banyak bermunculan, begitu juga di Kalimantan Barat. Saat ini, Koperasi Kredit yang ada di Kalimantan Barat, antara lain Koperasi Kredit (*Credit Union*) Lantang Tipo, Pancur Kasih, Khatulistiwa Bhakti, Keling Kumang, Bonaventura, Bina Masyarakat Sintang, Tepian Taduh dan masih banyak lagi yang lain.

Keberadaan koperasi kredit sangat membantu masyarakat kecil dan dirasakan manfaatnya ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan seperti saat sedang membutuhkan uang tunai untuk keperluan pendidikan anak-anak, untuk keperluan kesehatan dan keperluan kebutuhan hidup lainnya.

Untuk melihat maju mundurnya suatu koperasi kredit dalam meningkatkan penghasilan dan jumlah anggotanya, maka dipengaruhi oleh kredibilitas dan kecakapan para pengurusnya dalam menjalankan perputaran roda koperasi kredit tersebut. Seorang pengurus koperasi kredit dituntut harus mampu mengembangkan potensinya secara optimal, seperti melakukan inovasi dan mengembangkan kreatifitas dalam mengelola koperasi kredit agar mampu bersaing dalam dunia bisnis.

Dalam realitanya, koperasi kredit yang ada di Kalimantan Barat pada umumnya dan di Kabupaten Sintang pada khususnya masih belum mampu/belum maksimal dalam meningkatkan penghasilan dan jumlah anggotanya dalam menghadapi persaingan bisnis. Salah satu koperasi kredit yang ada di Kabupaten Sintang adalah Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA).

Berdasarkan hasil Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2016 Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA)

Sintang, diketahui struktur alat-alat perlengkapan pada Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang adalah sebagai berikut:

1. Struktur Pengawas, Penasehat dan Pengurus

a. Pengawas

Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Anggota.

b. Penasehat

Penasehat beranggotakan 3 (tiga) orang.

c. Pengurus

Pengurus terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 3 (tiga) orang Anggota Bidang.

2. Struktur Manajemen

a. Kantor Pusat

Kantor Pusat terdiri dari 1 (satu) orang General Manager, 1 (satu) orang Deputy, 6 (enam) orang Kepala Departemen, 1 (satu) orang Corporate Secretary dan 12 (dua belas) orang Staf Ahli.

b. Kantor Cabang

Kantor Cabang terdiri dari 20 (dua puluh) orang Manager, 30 (tiga puluh) orang Kepala Bagian, 7 (tujuh) orang Kepala Unit Pelaksana dan 72 (tujuh puluh dua) orang Staf.

Jumlah anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebanyak 32.021 orang. Jumlah anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang sebanyak 32.021 orang tersebut belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebanyak 35.269 orang, sehingga realisasi capaian jumlah anggota hanya sebesar 90,79%.

Berkenaan dengan kinerja pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) dalam kenyataannya masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak sinkronnya data Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan (LPj RAT) yang

disampaikan kepada anggotanya terutama berkenaan dengan target dan realisasi dari jumlah simpanan anggota.

Begitu pula dengan kinerja antar manajer yang masih mengedepankan sikap ego sektoral, di mana para manajer hanya mengejar target dan realisasi dari bidangnya masing-masing tanpa bekerjasama dengan manajer-manajer lainnya.

Selanjutnya untuk mengetahui jumlah simpanan Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1**

**Data Jumlah Simpanan Anggota Kopdit BIMA Sintang  
Tahun 2015 dan Tahun 2016**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>PENCAPAIAN (%)</b>
2015	262.429.892.743	272.029.128.278	103,66
2016	326.864.922.670	283.229.235.914	86,65

Sumber Data: LPj Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tahun Buku 2015 dan 2016, data diolah penulis.

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, maka diketahui bahwa jumlah simpanan anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari target sebesar Rp. 262.429.892.743 dan realisasinya sebesar Rp. 272.029.128.278, dengan demikian pencapaiannya sebesar 103,66%. Jumlah simpanan anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2016 mengalami penurunan dari target sebesar Rp. 326.864.922.670, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 283.229.235.914, sehingga pencapaiannya hanya sebesar 86,65%.

Jumlah pinjaman (kredit) anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2**

**Data Jumlah Pinjaman (Kredit) Anggota Kopdit BIMA Sintang  
Tahun 2015 dan Tahun 2016**

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN (%)
2015	265.148.554.280	267.430.596.545	100,86
2016	265.654.481.448	269.667.645.425	101,51

Sumber Data: LPj Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tahun Buku 2015 dan 2016, diolah penulis.

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, maka diketahui bahwa jumlah pinjaman (kredit) anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan.

Selanjutnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3**

**Data Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Kopdit BIMA  
Sintang Tahun 2015 dan Tahun 2016**

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN (%)
2015	5.892.671.535	1.654.836.928	28,08



2016	2.656.957.820	640.155.767	24,09
------	---------------	-------------	-------

Sumber Data: LPj Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tahun Buku 2015 dan 2016, diolah penulis.

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas, diketahui bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dengan melihat jumlah simpanan dan pinjaman, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Kredit BIMA Sintang masih belum mampu memaksimalkan kesejahteraan anggotanya.

Hal ini disebabkan karena keterbatasan berbagai faktor mungkin salah satunya faktor kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Pengurus koperasi kredit tersebut untuk melakukan pemasaran dan persiapan persediaan produk-produk dalam cara pengelolaan lembaga yang ada dari pengurus maupun anggotanya, kurangnya kultur kreatif, inovatif dan nilai tambah dalam kerangka meningkatkan daya saing koperasi, lemahnya membangun jaringan kemitraan koperasi dengan *stakeholder* serta kurangnya membangun “loyalitas dan komitmen anggota” terhadap koperasi kredit (*credit union*).

Dalam kaitannya dengan faktor kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Pengurus koperasi kredit, sangat ditentukan oleh pendidikan, pengetahuan dan pengalaman, serta profesionalisme dari Manager dan Karyawan Koperasi Kredit BIMA Sintang dalam pengelolaan manajemen koperasi kredit. Apabila Manager dan Karyawan Koperasi Kredit BIMA Sintang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang koperasi kredit, tentu saja tidak akan mampu mengelola koperasi kredit secara profesional.

Tolak ukur kesejahteraan anggota koperasi kredit tergantung dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui target yang ditentukan,

apabila mencapai target maka semakin besar pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggotanya dan otomatis dapat mensejahterakan anggota dari Koperasi Kredit BIMA Sintang.

Selain itu, banyaknya bermunculan koperasi kredit yang baru sehingga menimbulkan persaingan bisnis. Persaingan bisnis ini terjadi antar sesama koperasi kredit, di mana koperasi kredit yang lain lebih kreatif dalam melakukan pemasaran terhadap produk-produk, membangun loyalitas dan komitmen antar pengurus dan anggotanya, serta pengelolaan manajemen koperasi kredit yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan Koperasi Kredit BIMA Sintang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan belum mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya secara maksimal ?
2. Kendala-kendala dan solusi apa yang timbul dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan belum mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya secara maksimal.

2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dan solusi dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan.
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis.

#### **D. KERANGKA TEORITIK**

Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Konsep Koperasi Kredit, Teori Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, dan Konsep Persaingan Bisnis.

##### **1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)**

Menurut konsepsi negara hukum modern tentang penyelenggaraan negara kesejahteraan (***welfare state***), maka salah satu tugas negara itu adalah untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan selanjutnya menjamin pencapaiannya dengan peraturan hukum yang adil. Dengan itulah dapat dipahami bahwa pemerintah (pusat dan daerah) selaku penyelenggara tugas-tugas negara, selain itu mengatur dan/atau melaksanakan sendiri perwujudan kepentingan umum itu melalui berbagai tindakan dan keputusannya menurut hukum publik.

Ada 4 (empat) teori dasar mengenai kepentingan umum, yaitu:

- a. **Teori Keamanan:** menurut teori ini kepentingan masyarakat yang terpenting adalah kehidupan aman dan sentosa.
- b. **Teori Kesejahteraan:** mengajarkan bahwa kepentingan masyarakat yang terutama adalah kesejahteraan. Sejahtera berarti, bahwa kebutuhan-kebutuhan utama daripada kehidupan manusia dalam masyarakat dapat dipenuhi dengan semurah-murahnya dan secepat-cepatnya. Kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah: makan; keputusan dan tindakan pejabat-pejabat penguasa jangan sampai membuat warga masyarakat susah mencari makan, kesehatan, kesempatan kerja (*employment*); keputusan dan tindakan para pejabat

penguasa jangan sampai menimbulkan pengangguran, secara langsung atau tidak langsung.

- c. **Teori Efisiensi Kehidupan/Kepentingan Utama Masyarakat:** menurut teori ini adalah bahwa masyarakat harus dapat hidup secara efisien-efisiennya agar kemakmuran dan produktivitas meningkat, yakni secara komunikasi yang baik, pusat-pusat informasi yang berfungsi cepat, ramah, cermat, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan yang cukup, dan sebagainya.
- d. **Teori Kemakmuran Bersama (*Common Wealth*):** menyatakan bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, di mana ketegangan-ketegangan sosial (*social tensions*) dapat dikendalikan dengan baik, dan perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak melebar secara membahayakan.<sup>1</sup>

Di dalam negara modern "*Welfare State*", tugas pemerintah tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi. Oleh sebab itu, tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup sebagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat seperti masalah kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya. Jadi di dalam ***Welfare State***, pemerintah itu disertai *bestuurzorg* yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Pencetus teori negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah **R. Kranenburg**, yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 29-30.

<sup>2</sup>Bobby Savero, *Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar*, dalam <http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html>., diakses pada tanggal 19 Oktober 2016, pukul 20.00 wiba.

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) mengalami perkembangan dari politik negara (*political state*) menjadi negara hukum (*legal state*) dan selanjutnya menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*), hal mana disebabkan terjadinya pergeseran dan perkembangan peran negara sebagai akibat proses modernisasi dan demokratisasi, sehingga kekuasaan yang dimiliki negara adalah sebagai penentu kehendak terhadap aktivitas rakyat yang dikuasainya.

## 2. Konsep Koperasi Kredit

Koperasi kredit adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri.<sup>3</sup>

Koperasi kredit memiliki 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:

1. asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya);
2. asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota); dan
3. asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).<sup>4</sup>

Koperasi kredit ini bekerja hanya pada satu lapangan usaha saja. Koperasi ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota-anggotanya saja. Jadi koperasi ini hanya bergerak di lapangan kredit dan simpan pinjam. Koperasi ini bekerja atas dasar spesialisasi, yakni di bidang perkreditan dan simpan pinjam. Koperasi ini memakai sistem *single purpose*.<sup>5</sup>

Dalam kaitannya dengan simpan pinjam, **Malayu S.P. Hasibuan**, menyatakan bahwa: “Simpan Pinjam merupakan suatu

---

<sup>3</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/koperasi\\_kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/koperasi_kredit), diakses pada tanggal 20 Oktober 2016, pukul 19.30 wiba.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Psikologi Dalam Perusahaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, halaman 79.

transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat”.<sup>6</sup> Jadi simpan pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang.

Menurut **Pandji Anoraga** dan **Ninik Widiyanti**, bahwa: “Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.<sup>7</sup>

Menurut sejarahnya<sup>8</sup>, Koperasi Kredit lahir pertama kali pada pertengahan abad 19 di Jerman yang dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi yang suram. Lembaga ini digagas seorang Walikota Flammersersfield, Jerman Barat, bernama **Friedrich Wilhem Raiffeisien**. Pada abad ke-19, Jerman dilanda krisis karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani tak dapat bekerja dan banyak tanaman tak menghasilkan, sehingga penduduk pun kelaparan. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang kaya dengan memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga yang tinggi. Akibatnya banyak petani yang terjerat hutang, karena tidak mempunyai penghasilan dan dibebani bunga yang sangat tinggi, akhirnya mereka tak mampu membayar hutang. Sisa harta benda mereka pun disita oleh lintah darat. Karena kehidupan di desa sangat sulit, banyak orang pergi ke kota.

---

<sup>6</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2006, halaman 93.

<sup>7</sup>Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, halaman 47.

<sup>8</sup>Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pusat Koperasi Kredit Bali Artha Guna, *Dasar-Dasar Koperasi Kredit*, Penerbit CUCO Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 1.

Untuk mewujudkan impian tersebut, **Raiffeisen** bersama kaum buruh dan petani miskin membentuk lembaga Koperasi Kredit yang diberi nama *Credit Union* (CU) artinya, kumpulan orang-orang yang saling percaya. Koperasi kredit (*Credit Union*) yang dibangun oleh Raiffeisen, petani miskin dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman, bahkan menyebar ke seluruh dunia.

### 3. Teori Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang berbasis ekonomi kerakyatan, maka sepatutnya kegiatan ekonomi kerakyatan harus dituntun oleh regulasi atau pengaturan yang baik sehingga menciptakan rasa adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan hukum yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah proaktif dalam melihat perkembangan ekonomi sedemikian pesatnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat terarah dan mempunyai rel yang pasti sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam kegiatan ekonomi. Di sinilah peran pemerintah menciptakan regulasi sebagai *check and balance*, seperti membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi tetap terarah. Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian perlu diciptakan hukum yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberikan peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan. Dengan adanya regulasi hukum dalam kegiatan ekonomi dapat mencegah adanya tindakan sewenang-wenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan adil dan benar-benar dapat menunjang pembangunan ekonomi, karena melalui hukum yang ditegakkan dengan baik dan benar, masyarakat diarahkan untuk

melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

Pembangunan ekonomi nasional dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.<sup>9</sup>

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian.

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hukum sebagai "*a tool of social engineering*"
2. Hukum sebagai "*a tool of social control*"
3. Hukum sebagai alat kontrol pembangunan
4. Hukum sebagai sarana penegak keadilan

---

<sup>9</sup>Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, halaman 27.



5. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

#### 4. Konsep Persaingan Bisnis

Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis.<sup>10</sup> Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi.

Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 (dua) pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat “memperoleh pesanan” dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan/promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.<sup>11</sup>

Persaingan usaha juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa.

Sedangkan **Abdulkadir Muhammad** berpendapat bahwa di dalam dunia bisnis, persaingan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Apabila persaingan dilakukan secara jujur, tidak akan merugikan pihak manapun.<sup>12</sup>

Dalam dunia persaingan usaha dikenal dengan dinamika persaingan yang berarti perubahan-perubahan yang terjadi terhadap

---

<sup>10</sup>Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo W., *Pengantar Bisnis Modern, (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 22.

<sup>11</sup>B.N Maribun, *Kamus Manajemen*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, halaman 276.

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 285.

persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperebutkan pelanggan pada periode-periode tertentu. Untuk itu setiap perusahaan perlu memperhatikan dinamika yang terjadi agar mereka bisa mengikuti persaingan supaya tidak mengalami kekalahan dalam kompetisi di pasar.

Persaingan merupakan semacam upaya untuk menduduki posisi yang lebih tinggi di dalam dunia usaha. Bila jumlah pesaing cukup banyak dan seimbang, persaingan akan tinggi sekali karena masing-masing perusahaan memiliki sumber daya yang relatif sama. Bila jumlah pesaing sama tetapi terdapat perbedaan sumber daya, maka terlihat sekali mana yang akan menjadi *market leader*, dan perusahaan mana yang merupakan pengikut.<sup>13</sup>

Persaingan merupakan pendorong untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan teknik menjalankan perusahaan yang serba canggih. Persaingan inilah yang disebut dengan persaingan sehat yang dihargai oleh hukum. Persaingan sehat adalah persaingan yang dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaing.

Selain dari persaingan sehat, ada pula persaingan tidak sehat yang dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum, dan merugikan pesaing. Persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha.

Unsur-unsur persaingan usaha menurut **Abdulkadir Muhammad**, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Beberapa orang pengusaha (pelaku usaha);
- b. Dalam bidang usaha yang sama (sejenis);
- c. Bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha);

---

<sup>13</sup>Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Account Officer*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, halaman 260.

- d. Dalam daerah pemasaran yang sama;
- e. Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain;
- f. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>14</sup>

Selanjutnya dari segi ekonomi persaingan usaha menimbulkan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Menghasilkan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan manajemen usaha yang serba canggih;
- b. Memperlancar arus distribusi karena pelayanan yang baik dan cepat;
- c. Menguntungkan perusahaan karena kepercayaan masyarakat pada produk yang dihasilkan atau bermutu.<sup>15</sup>

Ada beberapa aspek positif persaingan dalam perspektif ekonomi, yaitu:

- a. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu;
- b. Persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen, karena ditentukan oleh permintaan, perilaku para penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli;
- c. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Dalam hal perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumber daya yang ada secara efisien;
- d. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi. Dalam kondisi persaingan setiap pesaing akan berusaha mengurangi biaya produksi serta memperbesar pangsa pasar.<sup>16</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 310.

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 256.

<sup>16</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, halaman 16.

atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>17</sup>

## **2. Sumber Data**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.<sup>18</sup> Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Untuk penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) terhadap literatur-literatur ilmu hukum, dilakukan menggunakan kartu penelitian yang memuat kolom catatan tentang: nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun penerbitan, dan halaman buku yang dikutip. Terhadap peraturan perundang-undangan disediakan kolom yang memuat: nomor, tahun, titel, dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dikutip.

Data yang diinventarisasi dari bahan hukum sekunder berupa konsep, asas, teori, dan norma hukum akan diaplikasikan secara proporsional ke dalam bab-bab analisis.

## **4. Metode Analisis Data**

Analisis masalah dan korelasinya dengan data yang dihimpun akan dilakukan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

## **F. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

### **1. Sebab-Sebab Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang Sebagai Pengelola Jasa Keuangan Belum**

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 13-14.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 44.

## **Mendatangkan Kesejahteraan Bagi Anggotanya Secara Maksimal**

Dalam perkembangannya, koperasi kredit mulai banyak bermunculan, begitu juga di Kalimantan Barat. Salah satu Koperasi Kredit yang ada di Kalimantan Barat adalah Koperasi Kredit (*Credit Union*) Bina Masyarakat (BIMA) Sintang.

Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1988 melalui rapat pembentukan yang dihadiri oleh 13 (tiga belas) orang karyawan Keuskupan Sintang dengan jumlah modal terkumpul untuk pertama kali sebesar Rp. 128.000,-. Terpilih sebagai ketua pengurus pada saat pembentukan adalah Bapak Paulus Jimbau dan bendahara merangkap manajer adalah Bapak Agrianus.

Berdirinya Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang lahir dari gagasan seorang pastor yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Sintang yaitu Pastor Yoep Van Lier, SMM. Misi utama dari Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang adalah melayani masyarakat pedalaman dan memberantas ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Adapun nama-nama pendiri Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Paulus Jimbau
- b. Oyotring
- c. Syarbinus Pangkas
- d. Agrianus
- e. Agustinus Aboi
- f. Sessilia Sero
- g. Yakobus Cil
- h. Petrus Liging
- i. Yosep Adam

- j. Bartolomeus Gani
- k. Emil
- l. P. Yoep Van Lier, SMM
- m. Lambertus Awan

Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang mulai berbentuk badan hukum sejak tahun 1995 dengan Badan Hukum Nomor 1555/BH/X, tanggal 24 Januari 1995.

Adapun visi dari Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang adalah “Koperasi Kredit (*Credit Union*) Yang Dicintai dan Terbesar Di Indonesia”.

Sedangkan misi dari Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang adalah:

1. Pelayanan pendidikan keuangan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada anggota dan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota.
3. Meningkatkan aset dan anggota.
4. Mengelola manajemen keuangan dengan efektif dan profesional.
5. Menggunakan sistem informasi manajemen terbaik dalam operasional lembaga.
6. Meningkatkan kompetensi SDM/Karyawan.
7. Melakukan sistem pengawasan kelembagaan yang optimal untuk meniadakan penyimpangan.
8. Memberikan pelayanan pinjaman dengan prinsip kehati-hatian.

Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang mengalami pertumbuhan yang pesat hingga saat ini. Sejak berdirinya Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang setiap tahunnya jumlah aset dan anggota terus bertambah. Pada tahun 1988 jumlah aset Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebesar Rp. 471.000,- dan anggotanya berjumlah 20 orang. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah aset Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA)

Sintang sebesar Rp. 363.993.950.560,- dan anggota berjumlah 32.021 orang.

Produk utama dari Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang adalah Simpanan Saham (Simpanan Kepemilikan), Simpanan Bunga Harian (SIBUHAR), dan Simpanan Berjangka.

Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang pada saat ini adalah:

1. Adrianus Lawi (Ketua)
2. Antonius (Wakil Ketua)
3. M. Pahan Apri, S.Pd (Sekretaris)
4. Pujiono, SE (Bendahara)
5. Galeh Gerson, S.Pd. M.Si (Anggota)
6. Helena Marlyn, S.Pd (Anggota)
7. Kiso, SH (Anggota)

Untuk menjadi anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI), tidak dalam keadaan cacat mental, sakit keras atau gangguan jiwa, mengisi formulir masuk anggota dan membayar kewajiban finansial yang ditetapkan sesuai pola kebijakan pengurus setiap tahun.

Saat ini jumlah anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebanyak 32.021 orang. Jumlah anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang sebanyak 32.021 orang tersebut belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebanyak 35.269 orang, sehingga realisasi capaian jumlah anggota hanya sebesar 90,79%.

Keberadaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sangat membantu masyarakat di Kabupaten Sintang dan sekitarnya dan dirasakan manfaatnya ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan seperti saat sedang membutuhkan uang tunai untuk keperluan pendidikan anak-anak, untuk keperluan kesehatan dan keperluan kebutuhan hidup lainnya.

Untuk melihat maju mundurnya suatu koperasi kredit dalam meningkatkan penghasilan dan jumlah anggotanya, maka dipengaruhi oleh kredibilitas dan kecakapan para pengurusnya dalam pengelolaan koperasi kredit tersebut. Seorang pengurus koperasi kredit dituntut harus mampu mengembangkan potensinya secara optimal, seperti melakukan inovasi dan mengembangkan kreatifitas dalam mengelola koperasi kredit agar mampu bersaing dalam dunia bisnis.

Pengelolaan manajemen koperasi kredit merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena apabila pengelolaannya baik, maka kondisi dan perkembangan koperasi kredit tersebut juga akan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dalam pengelolaan suatu koperasi kredit, manajemen koperasi memiliki tugas membangkitkan kemampuan dan motif yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berfikir selangkah lebih maju di dalam memberi manfaat dibanding pesaing, hanya dengan anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang, maka sangat ditentukan oleh pendidikan, pengetahuan dan pengalaman, serta profesionalisme dari Manager dan Karyawan Koperasi Kredit BIMA Sintang dalam pengelolaan manajemen koperasi kredit. Apabila Manager dan Karyawan Koperasi Kredit BIMA Sintang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang koperasi kredit, tentu saja tidak akan mampu mengelola koperasi kredit secara profesional.

Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah



dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi.

Sehubungan dengan hal tersebut, **R.M. Ramudi Arifin**, menyatakan bahwa: “dalam batas ekonomi, kesejahteraan seseorang/ masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota”.<sup>19</sup> Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota Koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota.

Dengan demikian, indikator kesejahteraan anggota koperasi kredit tergantung dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui target yang ditentukan, apabila mencapai target maka semakin besar pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggotanya dan otomatis dapat mensejahterakan anggota dari Koperasi.

Dalam kenyataannya, Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan masih belum mampu atau belum maksimal dalam mendatangkan

---

<sup>19</sup>R.M. Ramudi Arifin, *Manfaat Harga Koperasi: Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Laboratorium Manajemen Koperasi Institut Manajemen Koperasi (IKOPIN), Bandung, 2002, halaman 8.

kesejahteraan bagi anggotanya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.654.836.928,- (28,08%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 5.892.671.535,-. Sedangkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 640.155.767,- (24,09%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 2.656.957.820,-.

Tolak ukur kesejahteraan anggota koperasi kredit tergantung dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui target yang ditentukan, apabila mencapai target maka semakin besar pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggotanya dan otomatis dapat mensejahterakan anggota dari Koperasi Kredit BIMA Sintang.

Dampak dari pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan yang masih belum mampu dalam mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya adalah menurunnya jumlah anggota, di mana pada tahun 2015 jumlah anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebanyak 32.519 orang sedangkan pada tahun 2016 jumlah anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang hanya sebanyak 32.021 orang.

Penurunan jumlah anggota sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) orang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun merupakan angka yang cukup mengkhawatirkan, mengingat bisa saja para anggota yang keluar dari Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang pindah ke koperasi kredit lainnya.

## **2. Kendala-Kendala Yang Timbul dan Solusi Dalam Melakukan Pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang Sebagai Jasa Keuangan**

Pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan memang tidak mudah dan berjalan dengan mulus. Dalam prakteknya, pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan ternyata banyak menemukan kendala. Adapun kendala-kendala yang timbul dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan adalah:

1. Kinerja Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang masih asal-asalan, hal ini dapat dilihat dari tidak sinkronnya data Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan (LPj RAT) yang disampaikan kepada anggotanya terutama berkenaan dengan target dan realisasi dari jumlah simpanan anggota.

Sehubungan dengan kinerja Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang masih asal-asalan, maka sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pengurus yang sebagian besar hanya lulusan SLTA sehingga sangat wajar apabila dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan (LPj RAT) yang disampaikan kepada anggotanya tidak sinkron antara target yang ingin dicapai dengan realisasinya.

2. Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang memang belum mampu melakukan pemasaran dan persiapan persediaan produk-produk dalam cara pengelolaan lembaga yang ada, kurangnya kultur kreatif, inovatif dan nilai tambah dalam kerangka meningkatkan daya saing koperasi, lemahnya membangun jaringan kemitraan koperasi dengan *stakeholder*

serta kurangnya membangun “loyalitas dan komitmen anggota” terhadap koperasi kredit.

3. Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi masih belum dapat dilakukan secara tepat waktu dan dirasakan masih belum sepenuhnya menampung kesamaan kebutuhan, keinginan dan kepentingan dari pada anggotanya.
4. Kinerja antar Manajer yang masih mengedepankan sikap ego sektoral, di mana para manajer hanya mengejar target dan realisasi dari bidangnya masing-masing tanpa bekerjasama dengan manajer-manajer lainnya. Selain itu, mekanisme hubungan dan pembagian kerja antara Pengurus, Manajer dan Pengawas masih belum berjalan dengan serasi.
5. Minimnya penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit  
Sejak berdirinya Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang tahun 1988 sampai sekarang, penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit hanya dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Padahal usia Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang hampir 30 tahun.
6. Anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota. Kebanyakan anggota koperasi belum menyadari bahwa koperasi merupakan suatu wadah usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan mereka.
7. Kurangnya partisipasi para anggota dalam kegiatan organisasi koperasi, apabila Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) banyak anggotanya yang tidak hadir. Akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mereka rasakan sebagai keputusan yang mengikat.

Berbagai kendala yang disebutkan di atas merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang saat ini, sehingga mempengaruhi kelangsungan dari lembaga Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang.

Dengan melihat kendala-kendala yang timbul dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan, maka pengurus diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis. Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis adalah:

1. Melakukan mekanisme pemilihan pengurus yang profesional  
Profesionalisme kepengurusan merupakan syarat mutlak bagi perkembangan koperasi kredit, oleh karena itu perlu adanya mekanisme pemilihan pengurus yang lebih berkualitas melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang melibatkan seluruh anggota koperasi kredit.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  
Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka perlu dilakukan perekrutan pengurus yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam mengelola koperasi kredit sehingga dapat bersaing dengan koperasi kredit lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi antara Pengurus, Manajer dan Karyawan  
Koordinasi di antara pengurus koperasi kredit sangat diperlukan agar pengelolaan koperasi kredit dapat berkembang dan mencapai tujuan untuk mensejahterakan anggotanya.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit.

5. Meningkatkan partisipasi para anggota dalam kegiatan organisasi koperasi kredit.

### **3. Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang Sebagai Pengelola Jasa Keuangan Dalam Mengembangkan Usahanya Guna Menghadapi Persaingan Bisnis**

Berbicara mengenai koperasi, maka tidak akan terlepas dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Setiap koperasi pasti memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Menurut **Van der Heiden**, Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan ketentuan fundamental yang mengatur dan menentukan hal ihwal organisasi, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan koperasi.

Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan sumber peraturan tata tertib yang dasar bagi tatanan kehidupan organisasi atau usaha koperasi yang memuat ketentuan-ketentuan pokok yang dibuat untuk para anggota organisasi/koperasi. Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan perincian dari Anggaran Dasar (AD). Ketentuan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) relatif lebih mudah dirubah daripada ketentuan pada Anggaran Dasar (AD).

Pentingnya AD/ART koperasi, disebabkan karena memberi kekuatan hukum bagi koperasi, sebagai pedoman dalam pengelolaan usaha dan organisasi koperasi, mengatur hubungan antara anggota dengan anggota, mengatur hubungan anggota dengan bisnis koperasi, mengatur hubungan anggota dengan pengurus, pengawas, dan manajer, serta mengatur hubungan antara koperasi dengan pihak ketiga.

Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut disampaikan beberapa laporan tahunan yang memuat hal-hal yang perlu diketahui dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan kekuasaan

tertinggi dalam organisasi koperasi untuk dapat dibahas dan sekaligus berdasarkan musyawarah mufakat bersama mendapat pengesahan dari seluruh anggota.

Pengaturan kekuatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara eksklusif di atas secara yuridis diatur dalam undang-undang koperasi di setiap negara. Tujuan pengaturan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang demikian ini yaitu untuk menjamin keikutsertaan para Anggota, menyetujui atau tidak menyetujui program ataupun masalah yang harus ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Secara konsep teoritis, tanggung jawab Pengurus koperasi adalah tidak terbatas. Berbeda dengan tanggung jawab persero dalam Perseroan Terbatas, dimana hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Tanggung jawab Pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menentukan bahwa:

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”.
- (2) disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap pengurus koperasi adalah tanggung renteng (bersama-sama), walaupun dalam keadaan tertentu tanggung jawabnya adalah secara individual. Tanggung jawab tanggung renteng tersebut merupakan manifestasi dari asas kekeluargaan yang dianut dalam kegiatan koperasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan pemahaman dari maksud tanggung jawab Pengurus koperasi tersebut, maka dapat diidentifikasi menjadi beberapa bagian penting, antara lain:

- a. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka bersama-sama menanggung kerugian;
- b. Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Juga harus dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya kerugian itu;
- c. Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurus yang melakukan kelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum pidana.<sup>20</sup>

Menurut penulis, dalam bahasa sederhananya adalah bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau timbul karena tindakannya yang disengaja atau akibat kelalaiannya.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis, maka Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Akan tetapi, dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagian besar anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang tidak hadir. Hal ini disebabkan karena domisili dari anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang jauh, kurang pedulinya para anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang dalam mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Pengurus hanya mengundang para perwakilan anggota saja. Dengan demikian, pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam Rapat

---

<sup>20</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 207.



Anggota Tahunan (RAT) hanya di hadapan beberapa perwakilan anggota saja.

## **G. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Penyebab pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan belum mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya secara maksimal dikarenakan menurunnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.654.836.928,- (28,08%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 5.892.671.535,-. Sedangkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 640.155.767,- (24,09%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 2.656.957.820,-. Tolak ukur kesejahteraan anggota koperasi kredit tergantung dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui target yang ditentukan, apabila mencapai target maka semakin besar pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggotanya dan otomatis dapat mensejahterakan anggota dari Koperasi Kredit BIMA Sintang.
- b. Kendala-kendala yang timbul dan solusi dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan adalah: (a) Kinerja Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang masih asal-asalan; (b) Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang memang belum mampu melakukan pemasaran

dan persiapan persediaan produk-produk dalam cara pengelolaan lembaga yang ada; (c) Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi masih belum dapat dilakukan secara tepat waktu; (d) Kinerja antar Manajer yang masih mengedepankan sikap ego sektoral; (e) Minimnya penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit; (f) Anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota; dan (g) Kurangnya partisipasi para anggota dalam kegiatan organisasi koperasi. Berkaitan dengan solusi solusi dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan, antara lain: (a) Melakukan mekanisme pemilihan pengurus yang profesional; (b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (c) Meningkatkan koordinasi antara pengurus dan manajer; (d) Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit; dan (e) Meningkatkan partisipasi para anggota dalam kegiatan organisasi koperasi kredit.

- c. Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis, maka Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagian besar anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang tidak hadir. Hal ini disebabkan karena domisili dari anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang jauh, kurang pedulinya para anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang dalam mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Pengurus hanya mengundang para perwakilan anggota saja. Dengan demikian,

pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya di hadapan beberapa perwakilan anggota saja.

## **2. S a r a n**

- a. Perlu adanya koordinasi di antara Pengurus dan Manajer Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang dalam melakukan pengelolaan manajemen koperasi kreditnya, agar dapat mengembangkan usahanya dalam menghadapi persaingan bisnis.
- b. Diharapkan kepada Pengurus dan Manajer Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang agar melakukan langkah-langkah inovatif dalam pengelolaan dan pengembangan koperasinya sehingga mampu bersaing dengan koperasi kredit lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR :

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta.

-----, 2003, *Psikologi Dalam Perusahaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Atmosudirdjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djakfar, Muhammad, 2009, *Hukum Bisnis*, Malang Press, Malang.

Faisal, Sanapiah, 2002, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.

Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadisoeparto, Hartono, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Hasibuan, Malayu S.P., 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Hunt, Alan, 1993, *The Theory of Critical Legal Studies*, Exploration in Law and Society, Routledge, New York.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Cet. I, Bayumedia, Malang.

Makarao, Moh. Taufik dan Fauziah Suhardi, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta.

Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud MD., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Nugroho, T. Sumarno, 1991, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, PT. Hanidita, Yogyakarta.

Pakpahan, Norman S., 1994, *Pokok-pokok Pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*, ELIPS, Jakarta.

Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Satrio, J., 2000, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sewu, Lindawaty, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1998, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta.

Sirait, Ningrum N., 2004, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cet. I. Pustaka Bangsa Press, Medan.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamoedji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, R., 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suhardi, Gunarto, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Sulistiyono, Adi, & Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Jawa Timur.

Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, 2008, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**MAKALAH / JURNAL / INTERNET :**

Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pusat Koperasi Kredit Bali Artha Guna, 2006, *Dasar-Dasar Koperasi Kredit*, Penerbit CUCO Indonesia, Jakarta.

Burhan, Umar, 1997, *Memberdayakan Ekonomi Umat: Suatu Kajian Konsepsional Dalam Beberapa Bukti Empiris*, Jurnal Lintasan Ekonomi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.

Gamal, Mirza, “Visi Kesejahteraan (Ekonomi Nasional)”, Artikel, 2006, dalam <https://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perindungan-dana-nasabah-dalam-koperasi-simpan-pinjam/>, diakses tanggal 12 November 2016.

Savero, Bobby, *Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar*, dalam <http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html>.

[http://id.wikipedia.org/wiki/koperasi\\_kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/koperasi_kredit), diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.